

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI



Volume 1 - Nomor 2, Januari 2014

Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa)
Holiawati dan Septin Nur Lail
Universitas Pamulang

Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan)
Iin Rosini dan Januar Nur Zaman
Universitas Pamulang

Pengaruh Modernisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) 21 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)
Nofryanti dan Anita Charlina
Universitas Pamulang

Kajian Teoritis Implementasi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (SPKI) dan Dampaknya Terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Chamdun Mahmudi
Universitas Pamulang

Studi Fenomenologis Tentang Rendahnya Penerapan Profit and Loss Sharing pada Bank Syariah di Indonesia
Yusar Sagara dan Taryana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Perhitungan dan Pemotongan Zakat Pada Laporan Keuangan Bank Syariah Tinjauan Aspek Akuntansi, Hukum (Syariah) dan Pendapat Para Ulama
Rahmatullah dan Pujantoro
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta



Prodi Akuntansi - Fakultas Ekonomi - Universitas Pamulang

**EDITORIAL STAFF
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG**

**Pelindung
Rektor Universitas Pamulang**

**Penasehat
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pamulang
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang**

**Penanggung Jawab
Ketua Jurusan Akuntansi**

**Pemimpin Redaksi
Iin Rosini**

**Dewan Redaksi
Holiawati
Suglyanto
Yusar Sagara
Ferry Irawan**

**Redaksi Pelaksana
Nofryanti
Tri Haryanto
Abdullah Mubarak**

**Sekretariat
Yeni Lestasi
Sutini
Khaerul Umam
Putri Amanah
Guntur Darmawan**

ISSN 2339-0867

**Alamat Redaksi
Gedung A lantai 2 Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 Pamulang Barat-
Tangerang, Banten. Telp./Fax.(021) 741 2566**

DAFTAR ISI
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN 2339-0867

Volume 1. Nomor 2. Januari 2014	Halaman
Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa) Holiawati dan Septin Nur Lail Universitas Pamulang	88
Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan) Im Rosini dan Januar Nur Zaman Universitas Pamulang	100
Pengaruh Modernisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor) Nofryanti dan Anita Charlina Universitas Pamulang	110
Kajian Teoritis Implementasi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (SPKI) dan Dampaknya Terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia Chandun Mahmudi Universitas Pamulang	124
Studi Fenomenologis Tentang Rendahnya Pembiayaan <i>Profit and Loss Sharing (PLS)</i> Pada Bank Syariah di Indonesia Yusar Sagara dan Taryana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	132
Perhitungan dan Pemotongan Zakat Pada Laporan Keuangan Bank Syariah Tinjauan Aspek Akuntansi, Hukum (Syariah) dan Pendapat Para Ulama Rahmatullah dan Pujantoro Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	146

**Pengaruh Modernisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)**

Nofryanti

Universitas Pamulang

Anita Charlina

Universitas Pamulang

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, mengetahui Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi perusahaan terhadap kinerja perusahaan dari segi keuangan. Data-data analisa yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif yaitu data-data yang bersifat angka. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun 2009 s/d 2012. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak digunakan analisis korelasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, koefisien korelasi yang ditemukan 0.685 termasuk pada kategori yang kuat. Adapun perhitungan koefisien determinasi yang menyebutkan bahwa sebesar 47,0% Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak sedangkan 53% dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab lainnya sedangkan persamaan regresinya $Y = 15.174 + 0.696x$ dan perhitungan nilai t hitung sebesar 4.511 dan berdasarkan tabel distribusi t, nilai t tabel sebesar 2,01 yang berarti t hitung > t tabel dan bahwa rumus hipotesis statistik menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima dan yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bogor.

Kata kunci: Modernisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Penerimaan Pajak

1. Latar Belakang Penelitian

Secara garis besar sebagaimana tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Sumber penerimaan negara terbagi menjadi dua yaitu Penerimaan pajak dan penerimaan non pajak. Hasil bumi atau kekayaan alam merupakan penerimaan non pajak yang sebelumnya dijadikan salah satu sumber penerimaan yang saat ini sudah mulai menipis, maka sumber penerimaan negara yang kini menjadi tumpuan negara diperoleh dari sektor pajak. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar penerimaan pajak dapat tercapai dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan komponen utama penerimaan negara yang terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta memahami akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan. Penerimaan pajak yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat kepada negara yang telah menyediakan fasilitas publik seperti jalan, pendidikan, pertahanan, keamanan dan kesehatan. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai peranan sangat penting.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jendral pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun pajak dari masyarakat terus berupaya dengan berbagai cara untuk mengamankan penerimaan pajak. Yakni dengan memperbaiki dan meningkatkan penilaian masyarakat terhadap citra Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan, dan Integritas serta produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan. Keberhasilan upaya ini juga dapat ditentukan oleh tiga hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Serta memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat. Pajak yang dihimpun dari masyarakat yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur melalui UU No. 17 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur melalui UU No. 18 Tahun 2000, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur melalui UU No. 27 Tahun 2000, dan Bea Materai yang diatur melalui UU No. 30 Tahun 2000. (Waluyo, 2008 : 57)

Untuk menjamin tercapainya sasaran penerimaan tersebut, kebijakan umum perpajakan yang ditetapkan adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kegiatan Intensifikasi dilakukan dengan perbaikan sistem dan pengawasan serta penyuluhan untuk kegiatan Wajib Pajak yang sudah ada sehingga mereka akan membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan perluasan Objek Pajak dan menambah Wajib Pajak Baru.

Seperti yang telah dikemukakan di atas salah satu upaya intensifikasi adalah dengan perbaikan sistem administrasi dari Direktorat jendral Pajak sendiri (Internal) yang mencakup perbaikan perubahan struktur organisasi yang disusun berdasarkan fungsi masing-masing bagian yang bertujuan mewujudkan sikap profesionalisme dan menghindarkan tumpang tindih dalam penyelesaian pekerjaan masing-masing seksi, adanya Account Representative (AR) yang bertugas memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak, pemusatan PPN sehingga memudahkan pengawasan dan pengadministrasian pemenuhan kewajiban PPN bagi Wajib Pajak, sistem pembayaran On-line yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam hal pembayaran untuk mengetahui transaksi penerimaan pajak setiap harinya bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak, sistem pelaporan pajak secara elektronik (e-SPT) yang akan memudahkan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak maupun dipihak Wajib Pajak dan perubahan sistem yang awalnya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). Rusjdi (2007: 79)

Dengan Perubahan Sistem Informasi Wajib Pajak akan mendapat pengawasan dan konsultasi yang lebih intensif dari Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, hal ini untuk menghindari Wajib pajak melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun kesalahan karena Wajib Pajak tidak mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Perubahan dan perbaikan sistem administrasi ini diharapkan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Dengan Pelayanan yang baik dan memuaskan, maka Wajib Pajak akan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan akan berdampak pada penerimaan. Pengelolaan penerimaan dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut : (1). Program modernisasi sistem perpajakan melalui pengembangan teknologi informasi di DJP masih menunjukkan hasil informasi yang kurang optimal. (2). Kurangnya pengetahuan tenaga administrasi dalam pengurusan pajak. (3). Sistem administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KP) Bogor berbelit-belit. (4). Integritas dan produktivitas pegawai KPP Bogor yang masih rendah. (5). Pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan masih rendah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. (6). Masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai e-system dan cara penggunaannya.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dapat diuraikan sebagai berikut : (1). Yang dimaksud Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 yang dikutip Pandiangan (2007:15) tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. (2). Yang dimaksud penerimaan pajak PPh 21 adalah penerimaan seluruh pajak penghasilan. (3). Adapun obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung dari Bulan September sampai dengan November 2013.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, (2). Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, (3). Bagaimana pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. (2). Untuk mengetahui penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. (3). Untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Manfaat Penelitian (1). Untuk memperluas serta menambah pengetahuan mengenai keberhasilan perpajakan bila dilihat dari sisi wajib pajak, dan untuk mengetahui sampai seberapa jauh teori yang diperoleh selama peneliti mengikuti perkuliahan dapat diterapkan dalam praktek. (2). Dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang perpajakan, khususnya perencanaan pajak sehubungan dengan praktik pelaksanaannya di perusahaan. (3). Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain, meskipun penelitian ini jauh dari sempurna. (4). Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Sebagai bahan masukan yang berguna untuk KPP dan Direktorat Jendral Pajak dalam upaya meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak.

1.6. Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya signifikansi pengaruh antara variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan variabel penghasilan maka hasil perhitungan koefisien dalam penelitian ini dilakukan uji hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut: Hipotesis yang akan diuji diberi simbol H_0 (Hipotesis nol) dan disertai dengan H_a (Hipotesis alternatif). H_0 akan secara otomatis diterima, kalau H_0 ditolak. Pengujian ini menggunakan uji hipotesa "t".

$H_0 : r = 0$ Tidak ada pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

$H_a : r \neq 0$ Terdapat pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem informasi yang digunakan sebelum penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Menurut Hariadi (pajak.go.id) Sistem Administrasi Pajak adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun kantor Wajib Pajak yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clerical work) adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying), dan penyimpanan (filling) .

Menurut Indriantoro (pajak.go.id) Sistem Administrasi Pajak adalah suatu pelayanan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan langsung dari kantor Fiskus dan termasuk pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan.

Dari pengertian diatas Sistem Administrasi Pajak mempunyai aspek tersendiri menurut Rusjdi (2007: 23) antara lain : Tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. Struktur organisasi sebelum

penerapan modernisasi administrasi perpajakan dibagi berdasarkan jenis pajak sehingga tugas pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan tersebar pada masing-masing seksi teknis yaitu seksi PPh badan, seksi PPhn serta seksi PPh pemotongan dan pemungutan. Fungsi pelayanan dan pengawasan pada Struktur Organisasi Kantor pelayanan ini tersebar di masing-masing seksi berdasarkan jenis pajaknya. Sistem Pembayaran Secara Manual, sebelum penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, monitoring pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melaporkan SSP lembar ke-3.

Sistem ini mempunyai kelemahan karena pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak baru diketahui setelah SSP lembar ke-3 dilaporkan oleh Wajib Pajak dan masuk ke Kantor Pelayanan Pajak, kewajiban ini jangka waktunya adalah tanggal tertentu pada bulan berikutnya bersamaan dengan pelaporan SPT masanya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Sistem Administrasi Pajak adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak yang berdasarkan pada jenis pajak, sehingga tugas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan tersebar pada masing-masing seksi teknis. Hal ini menyebabkan kurang fokusnya tugas yang diemban karena salah satu seksi harus melayani semua Wajib Pajak dengan berbagai permasalahan perpajakannya.

2.3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 yang dikutip Pandiangan (2007 : 15) tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Dalam modernisasi administrasi terjadi perubahan yang mendasar menyangkut struktur organisasi ini lebih sederhana, rentang kendali (span of control) lebih singkat dimana Kantor Pelayanan Pajak Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini dimana pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda antara lain Kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak.

Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan. Account Representatif (AR) mempunyai fungsi sebagai jembatan atau mediator antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Selain adanya perubahan terhadap struktur organisasi terdapat juga berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi. Fasilitas tersebut antara lain weRRite, Call Centre, e-Filing, e-SPT, One-line Payment.

Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktivitas aparat, akan didukung juga oleh sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. SE-15/PJ/2007 JO. SE-25/PJ/2008, tentang persiapan penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sistem informasi yang pertama kali digunakan seiring dengan modernisasi perpajakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) di kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. SAPT menghasilkan data pembayaran dan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak secara dinamis. Kemudian

dikembangkan lagi menjadi sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) dengan menggunakan perangkat keras dan lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di Kantor Pusat.

2.4. Definisi Penerimaan Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:23.2), pendapatan didefinisikan sebagai berikut: "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pasal 1, pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut: "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional". Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut: Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:56) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
Undang-Undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerimaan pajak yang mudah dicapai mengurangi beban bagi wajib pajak.
- b. Tingkat Intelektual Masyarakat
Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.
- c. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)
Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat petugas pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.
- d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat
Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang

dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian ini dikhususkan pada pengamatan yang menganalisis pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor di Jalan Ir. H. Juanda No. 64 , Bogor 16122.

3.2. Teknik Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono (2005:91) Sampel adalah sebagian unit dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sampel acak (Random Sampling) yaitu dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi tanpa suatu kriteria tertentu. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 50 responden.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data serta bahan-bahan dalam usulan penelitian ini dilakukan melalui dua macam penelitian yaitu : (a). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan dilakukan untuk melengkapi kajian pustaka yang relevan dengan bahasa yang teknis dengan cara membaca dan mempelajari sumber-sumber bacaan, seperti : buku, majalah, Koran, maupun dari internet

Dan Penelitian lapangan (Field Research) Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti sehingga datanya akurat.

3.4. Metode Analisis Data

Skala Likert merupakan skala yang dapat memperlihatkan tanggapan konsumen terhadap karakteristik suatu produk atau persepsi konsumen. Menurut Sugiono (2005:86) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

- a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert yang menggambarkan peringkat jawaban.
- b. Dihitung total skor setiap variabel / subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
- c. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
- d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

3.5. Operasional Variabel penelitian

Berdasarkan variable yang terdapat dalam penelitian ini, ada beberapa pengertian yang digunakan yaitu :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Sistem Administrasi Perpajakan dirancang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak. Dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (e-SPT) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi On-Line Payment untuk pembayaran pajak.
2. Penerimaan Pajak. Penerimaan pajak adalah penerimaan seluruh jenis pajak yang terdiri dari Pajak penghasilan pasal 21

Pengukuran Variabel. Dalam menyelesaikan penelitian ini, yang digunakan sebagai pengukuran variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas atau Independent Variabel: Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan, diketahui dari Wajib Pajak yang patuh melaporkan SPT sebelum penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Wajib Pajak yang patuh setelah penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan.
2. Variabel Terikat atau Dependent Variabel: Penerimaan pajak, membandingkan data penerimaan pajak sebelum dan setelah penerimaan pajak Tahun 2009 sampai dengan 2012.

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Skala
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (<i>independent</i>) (X)	“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.” (Suparman 2007:1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi. 2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. 3. Penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Pelaksanaan Good Governance (Siti Kurnia Rahayu, 2009:110) 	Likert
Penerimaan Pajak (<i>dependent</i>) (Y)	Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. (UU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)	<ol style="list-style-type: none"> a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; b. Tingkat Intelektual Masyarakat c. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi) d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:56)	Likert

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada KPP Pratama Bogor

Sistem Administrasi perpajakan Modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor diukur menggunakan empat dimensi dan dioperasionalisasikan menggunakan 12 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden terhadap setiap butir pernyataan yang diajukan pada masing-masing indikator.

Struktur Organisasi, Pada indikator Struktur organisasi dapat dilihat secara keseluruhan restrukturisasi organisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada Bogor sudah baik. Hal ini terlihat dari persentase skor yang diperoleh dari tanggapan responden mencapai 3,86% dan bila merujuk ke tabel 3.1 masuk dalam kriteria baik: Bila dikaji berdasarkan butir pernyataan, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada Bogor sudah efektif dan efisien, karena konsep dari sistem administrasi perpajakan modern memang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan sudah diterapkan dengan sangat baik. Struktur organisasi sudah disesuaikan dengan lingkungan eksternal tampak Kantor Pelayanan Pajak Pratama berada. Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat baik, sebaliknya struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Bojonagara merupakan yang paling rendah meskipun masih masuk dalam kategori baik.

Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi. Pada indikator penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dapat dilihat secara keseluruhan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada Bogor dalam penyempurnaan proses bisnis sudah tinggi. Hal ini terlihat dari persentase skor yang diperoleh dari tanggapan responden mencapai 4.13 dan bila merujuk ke tabel 3.1 masuk dalam kriteria sangat baik. Bila dikaji berdasarkan butir pernyataan, metode perbaikan proses bisnis sudah dilakukan dengan efektif dan efisien. Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyempurnaan proses bisnis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan yang paling tinggi, yaitu masuk kategori sangat tinggi, sebaliknya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyempurnaan proses bisnis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk dalam kategori tinggi

Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia. Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan yang cukup baik, yaitu masuk kategori cukup, sebaliknya penyempurnaan manajemen sumber daya manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori kurang baik.

Pelaksanaan Good Governance. Pada indikator pelaksanaan good governance dapat dilihat secara keseluruhan tata kelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sudah baik. Hal ini terlihat dari persentase skor yang diperoleh dari tanggapan responden mencapai 4,01% dan bila merujuk ke tabel 3.1 masuk dalam kriteria baik. Bila dikaji berdasarkan butir pernyataan, pengawasan internal dalam pelaksanaan good governance sangat diperlukan. Kode etik pegawai belum diterapkan dengan tegas dan konsisten sehingga implementasi dan evaluasi dalam program modernisasi belum dapat tercapai. Tanggapan responden tersebut menjawab identifikasi masalah dimana good governance sangat diperlukan untuk menegakkan Kode Etik Pegawai

sehingga biaya yang dikeluarkan untuk implementasi dan evaluasi dalam program modernisasi lebih banyak.

Pada variabel sistem administrasi perpajakan modern dapat dilihat secara keseluruhan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Bogor sudah termasuk sangat baik. Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Bogor merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat baik. Sebaliknya sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Bogor merupakan yang paling buruk meskipun masih termasuk dalam kategori baik. Melalui gambaran data dari keempat indikator maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Bogor sudah termasuk sangat baik.

4.2. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tabel 1
Model Regresi Linier

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.174	5.496		2.761	.008
Modernisasi administrasi perpajakan	.696	.107	.685	6.522	.000

a. Dependent Variable: penerimaan pajak

Sesuai dengan uji regresi linear sederhana didapatkan persamaan $15.174 + 0,696X$. yang berarti bahwa konstanta sama dengan 15.174 menyatakan jika modernisasi administrasi perpajakan (X) terhadap penerimaan pajak (Y) nilainya 0,696. Koefisien regresi variabel penerimaan pajak sama dengan 0,696 dinyatakan bahwa setiap penambahan sebesar 1% akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 0,696 dengan anggapan bahwa nilainya tetap atau konstant.

Tabel 2
Model Korelasi

		modernisasi pajak	penerimaan pajak
modernisasi pajak	Pearson Correlation	1	.685**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	50	50
penerimaan pajak	Pearson Correlation	.685**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil analisis pengolahan data antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa besarnya nilai $r = 0,685$. Artinya, korelasi modernisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak mempunyai hubungan positif yang kuat (0.60 - 0.799).

Tabel 3
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.470	.459	2.484

a. Predictors: (Constant), modernisasi pajak

Pengaruh yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang ditunjukkan oleh *R square* (R^2) pada tabel 16 hanya sebesar 0.470. Artinya, 47,0% penerimaan pajak dipengaruhi modernisasi administrasi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 53 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 4
Uji Statistic Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.174	4.350		4.169	.000
modernisasi pajak	.599	.092	.685	6.511	.000

a. Dependent Variable: penerimaan pajak

Hasil pengujian diperoleh t hitung 6,511 ($6,511 > 2,01$). Artinya nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini mengandung makna bahwa semakin baik modernisasi administrasi perpajakan, maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak.

4.3. Penerimaan pajak

Pada tahun 2009 penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor menurut rencana dinyatakan dalam jutaan Rp 5.505.021 dengan realisasinya Rp 3.771.564 dengan persentase 68,51%. Tahun 2010, penerimaan pajak di KPP Bogor menurut rencana yang dinyatakan dalam jutaan Rp 5.164.902 dengan realisasinya Rp 3.186.584 dengan 61,70. Pada tahun 2011, penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor yang dinyatakan dalam jutaan Rp 5.321.185 dengan realisasinya Rp 4.350.870 dengan persentase 81,77. Pada tahun 2012, penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor menurut rencana dinyatakan dalam jutaan Rp 6.559.980 dengan realisasinya Rp 5.736.459 dengan 87,45.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Pelaksanaan Sistem Administrasi perpajakan modern pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah Bogor sudah termasuk sangat baik, ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Artinya, sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi struktur organisasi, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, serta pelaksanaan good governance secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor mengalami perkembangan yang fluktuatif. Rata-rata kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai dengan 2012 sebesar 74,85%. Sedangkan menurut hasil kuesioner diperoleh jawaban sebagian besar responden menyatakan setuju dengan penerimaan pajak.

3. Pengaruh penerapan Sistem Administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak. Dari hasil analisis pengolahan data antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa besarnya nilai $r = 0,685$. Artinya, korelasi modernisasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak mempunyai hubungan positif yang kuat (0.60 - 0.799). Pengaruh yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang ditunjukkan oleh R square (R^2) pada tabel 19 hanya sebesar 0.470. Artinya, 47,0% penerimaan pajak dipengaruhi modernisasi administrasi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 53 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian diperoleh t hitung 6,511 ($6,511 > 2,01$). Artinya nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

5.2. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yaitu sebagai berikut:

1. Dengan pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sudah baik, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus mempertahankan, agar pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern dapat lebih baik.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, diharapkan meningkatkan kesadaran wajib pajak diiringi peningkatan penerimaan pajak yang signifikan. Dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan pengaruh yang kuat antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor disarankan untuk lebih meningkatkan sistem administrasi perpajakan modern. Sistem Administrasi perpajakan Modern akan membuat penerimaan pajak tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern akan membuat penerimaan pajak semakin rendah.

Referensi

- Carolina Veronica. Pengetahuan Pajak. Diakses pada 24 April 2012 dari www.google.com, 2009
- Djatnika Adjat. Diakses pada 16 April, 2012 dari World Wide Web : Harian Seputar Indonesia, 2012
- Hendroharto Agus. Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Satu. Tesis Magister Sains pada Universitas Indonesia Jakarta. 2006
- Indra Ismawan. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta : PT Elek Media Komputindo. 2001
- Hutagaol John, Wing Wahyu Winarno & Arya Pradipta. Jurnal Perpajakan Indonesia. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, 6(2), 2007
- Mardiasmo. Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011). Yogyakarta : Andi. 2011
- Narimawati Umi. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi : Genesis Rapina, 2010
- Notoatmodjo. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta, 2007

- Palil Rizal. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. 2010
- Rahayu Siti Kurnia. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010
- Rahman Abdul. Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi, 4(1), 2009
- Rahayu Sri dan Ita Salsalina Lingga. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, 1(2), 2009